

**KATEGORI**

Sosial

**SUB KATEGORI**

Pendidikan

**NAMA INDIKATOR**

Persentase Penduduk Berusia >15 Tahun Yang Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

**TAHUN**

2017

**KONSEP**

- **Persentase Penduduk Berusia >15 Tahun Yang Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)** adalah Proporsi penduduk usia kurang dari 15 tahun yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia kurang 15 tahun.
- **Penduduk Berusia >15 Tahun Yang Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)** adalah penduduk usia kurang dari 15 tahun yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia kurang 15 tahun.
- **Penduduk** adalah orang yang memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di wilayah.
- **Melek Huruf** adalah tidak buta aksara atau bisa baca tulis.

**RUJUKAN**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dan Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD, RPJMD Dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah(RKPD) Yang di Selenggarakan Oleh Pusat Pendidikan Keuangan Dan Pelatihan Pemerintahan Daerah (Pusdiklat Pemda)

**RUMUS**

$$\frac{\text{Persentase Penduduk Berusia } >15 \text{ Tahun Yang Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)}}{\text{Penduduk Berusia } >15 \text{ Tahun}} \times 100\%$$

AMHt-15 = -----x100%

$$\frac{\text{Persentase Penduduk Berusia } >15 \text{ Tahun Yang Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)}}{\text{Penduduk Berusia } >15 \text{ Tahun}} \times 100\%$$

**WALI DATA**

BPS Kabupaten Pematang

**UKURAN**

Jiwa

**UNIT**

Seksi Statistik Sosial

**KEGUNAAN**

Untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

## **INTERPRETASI**

Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

## **KETERANGAN**

AMHt 15 :jumlah penduduk 15 yang melek huruf tahun ke-t Pt 15 :jumlah penduduk 15 pada tahun ke-t BHT 15 :jumlah penduduk 15 yang buta huruf pada tahun ke-t Selain dari Susenas, variabel indikator AMH dan ABH juga didapat dari Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

## **SUMBER**

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) - Modul Sosial Sosial Budaya dan Pendidikan Tahun 2005 dan 2009

## **METODOLOGI**

- Metode pemilihan sampel dalam studi ini dilakukan dalam 6 tahap. Pada tahap pertama dipilih 7 propinsi secara purposive (sengaja) namun dapat mewakili wilayah barat dan timur Indonesia, serta wilayah urban dan rural. Ketujuh propinsi tersebut adalah Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur (mewakili wilayah barat), Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan (mewakili wilayah timur). Tahap kedua adalah memilih 2 kabupaten/kota dari masing-masing propinsi kecuali DKI Jakarta 3 kota secara purposive. Dari masing-masing kabupaten/kota, dipilih sampel 2 kecamatan secara purposive. Sampai dengan tahap ketiga, pemilihan sampelnya dilakukan BPS Pusat.
- Selanjutnya tahap keempat, yaitu pemilihan desa dilakukan oleh petugas BPS Propinsi dimana pada setiap kecamatan dipilih 2 desa. Tahap kelima adalah pemilihan 2 Rukun Tetangga (RT) pada setiap desa yang dilakukan oleh petugas lapangan (BPS Kabupaten/Kota) dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat RT tersebut heterogen. Tahap terakhir (keenam) adalah pemilihan rumah tangga dimana pada setiap RT dipilih 30 rumah tangga dengan cara systematic sampling yang distratalkan berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Pemilihan sampel rumah tangga didasarkan pada hasil pendaftaran rumah tangga di masing-masing RT. Perhitungan interval sampel dan pemilihan angka random pertama (R1) untuk pemilihan sampel rumah tangga dilakukan pada setiap RT terpilih.
- Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (tatap muka) antara pencacah dengan responden dengan menggunakan kuesioner. Responden dari rumah tangga terpilih adalah kepala rumah tangga, suami/istri, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui secara persis karakteristik rumah tangga bersangkutan.

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

BPS RI

## **DOKUMEN**

LPPD

